

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

Nuriva Mawaddah Andani^{1*}, Muhtar Lutfi², Edhi Taqwa³, Rita Yunus⁴, Musdayati⁵

¹⁻⁵Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Tadulako, Indonesia

Email: nurivaa16@gmail.com^{1*}, fekonmuhtarlutfi@gmail.com²

*Penulis korespondensi: nurivaa16@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze and quantify the influence of government spending on economic growth in Central Sulawesi Province. Amid the regional economic dynamics following the COVID-19 pandemic and the implementation of regional autonomy, government expenditure, as reflected in the Regional Budget (APBD), plays a crucial role as a fiscal policy instrument to stimulate development. This research employs a quantitative approach with an associative design, utilizing annual time-series secondary data from 2020 to 2023 sourced from the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis was conducted using a simple linear regression method with EViews 12 software to test the research hypothesis. The findings indicate that government spending has a significant and positive effect on economic growth. This is evidenced by a regression coefficient of 1.153 and a significance level of 0.0246 ($p < 0.05$). The model demonstrates a very high explanatory power, with an R-Squared value of 0.9993, indicating that 99.93% of the variation in economic growth can be explained by government spending. This study confirms that effective budget allocation to productive sectors, such as infrastructure and human capital, is a strategic driver of regional economic growth, making efficient management of the APBD key to successful regional development.*

Keywords: *Central Sulawesi; Economic Growth; Fiscal Policy; Government Spending; Regional Budget*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkuantifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah dinamika perekonomian regional pascapandemi COVID-19 dan implementasi otonomi daerah, peran belanja pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi krusial sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, memanfaatkan data sekunder runtut waktu (time-series) tahunan dari 2020 hingga 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana dengan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.153 dan tingkat signifikansi 0.0246 ($p < 0.05$). Model ini juga memiliki kemampuan menjelaskan yang sangat tinggi, di mana nilai R-Squared mencapai 0.9993, yang berarti 99,93% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa alokasi belanja yang efektif pada sektor produktif seperti infrastruktur dan modal manusia merupakan pendorong strategis pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: APBD; Kebijakan Fiskal; Pengeluaran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi; Sulawesi Tengah

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan fundamental pembangunan jangka panjang bagi suatu negara atau wilayah, yang mencerminkan peningkatan kapasitas produktif secara berkelanjutan (Pramasty & Rosintan S, 2022). Peningkatan ini diukur melalui kemampuan menghasilkan barang dan jasa, yang didorong oleh pertambahan kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi (HACIYEV, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif adalah prasyarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Livingston et al., 2022). Teori-teori klasik hingga modern secara konsisten

menempatkan akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai pilar utama penggerak dinamika ekonomi (Meacci, 2020).

Di antara berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah memegang peran sentral (Andini, 2024). Dalam Teori Ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai stimulus permintaan agregat yang kuat, terutama saat perekonomian melambat (Wahyudi, 2020). Investasi pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada akumulasi modal manusia dan fisik. Hal ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat secara aktif memengaruhi laju pertumbuhan jangka panjang (Rehman et al., 2020; Nezhnikova, 2020; Bunyamin, 2023).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah memperkuat peran pemerintah provinsi dalam mengelola dan mengakselerasi pembangunan di wilayahnya (Mulyadi et al., 2024). Tanggung jawab ini diwujudkan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi cerminan prioritas pembangunan (Sumber (Asti & Sinurat, 2023)). Provinsi Sulawesi Tengah, dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pertambangan dan pertanian, menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur yang belum memadai dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan (Khusaini, 2022). Oleh karena itu, efektivitas alokasi pengeluaran pemerintah menjadi krusial untuk membuka potensi ekonomi dan meningkatkan daya saing regional.

Selama periode 2020-2023, perekonomian Sulawesi Tengah menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun berdaya tahan. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, ekonomi daerah berhasil pulih dan tumbuh impresif, mencapai 6,29% pada 2021 dan 6,38% pada 2022 (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024). Pemulihan ini beriringan dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penanganan kesehatan, dan program pemulihan ekonomi (PEN) (Junaedi & Salistia, 2020). Fenomena ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara intervensi fiskal pemerintah dan kinerja ekonomi regional.

Meskipun observasi data menunjukkan tren yang sejalan, diperlukan analisis empiris untuk mengkuantifikasi besaran pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menjadi relevan karena sejalan dengan temuan Maneerat and Fazal (2020), yang juga mengonfirmasi adanya pengaruh signifikan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks negara berkembang. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara kuantitatif pengaruh

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bukti bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antarvariabel melalui analisis data numerik dan pengujian hipotesis statistik. Desain asosiatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan pengaruh antara variabel independen (pengeluaran pemerintah) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Data tersebut berupa data runtut waktu (time series) yang mencakup periode tahunan dari 2020 hingga 2023. Penggunaan data time series memungkinkan analisis tren dan dinamika hubungan antarvariabel sepanjang periode tersebut. Seluruh data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik dari BPS tingkat pusat maupun BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Variabel ini dioperasionalkan sebagai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar harga konstan, yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Sementara itu, variabel independen adalah Pengeluaran Pemerintah (X), yang dioperasionalkan sebagai total realisasi belanja pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari data APBD, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Teknik ini dipilih untuk mengestimasi dan mengukur seberapa besar pengaruh linear dari variabel Pengeluaran Pemerintah (X) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak statistik Econometric Views Student Version 12 (EViews) untuk perhitungan regresi dan pengujian hipotesis.

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta X + u$. Di mana Y adalah Pertumbuhan Ekonomi, X adalah Pengeluaran Pemerintah, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, dan u adalah variabel gangguan (error term). Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji t (uji parsial) untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen. Selain itu, digunakan pula Uji Koefisien

Determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan satu di antara indikator utama dalam mengukur kinerja suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akumulasi modal adalah satu di antara komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi yang mencakup investasi pada aset fisik seperti infrastruktur, teknologi, serta sumber daya manusia. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, tenaga kerja akan menjadi lebih produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas produksi nasional (Loli-Poma et al., 2021). Selain itu, pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan angkatan kerja dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, selama ada cukup lapangan kerja yang tersedia untuk menampung tenaga kerja baru tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Zhulaikah (2024), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat dari peningkatan produksi dan pendapatan nasional dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2020-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif, terutama pada tahun 2020 hingga 2022. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya pembatasan skala sedang dan besar akibat pandemi COVID-19, sehingga berdampak pada seluruh sektor perekonomian. Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah kembali membaik saat memasuki Tahun 2023. Perbaikan pada segala sektor perekonomian menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020-2023.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023 (Persen).

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	-3,88	3,97	3,93	2,94
Banggai	-1,03	0,58	5,72	1,31
Morowali	-2,63	21,83	26,03	18,24
Poso	0,47	3,70	2,62	2,82
Donggala	-3,36	3,69	2,90	3,75
Toli-Toli	0,85	3,36	2,58	2,51
Buol	8,15	3,60	2,35	2,31
Parigi Moutong	5,77	3,59	2,49	2,33
Tojo Una-Una	-8,95	2,93	2,30	2,22
Sigi	-8,58	4,27	2,02	2,08
Banggai Laut	2,05	3,16	2,72	2,43
Morowali Utara	5,93	8,93	34,28	21,21
Palu	3,12	4,56	2,95	3,60
Jumlah	8,15	10,14	13,78	10,55
Rata-Rata	0,63	0,78	1,06	0,81

Sumber : BPS Sulawesi Tengah (2024).

Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa Kabupaten Morowali dan Morowali Utara merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dalam empat tahun terakhir mencapai 15,87%, sedangkan Kabupaten Morowali Utara sebesar 17,59%. Kehadiran perusahaan pertambangan berskala besar di wilayah ini memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lainnya yang turut mengalami peningkatan, sehingga mendorong pembangunan di berbagai sektor secara signifikan.

Sebaliknya, Kabupaten Sigi dan Tojo Una-Una mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah, masing-masing dengan rata-rata sebesar 0,053% dan 0,375%. Rendahnya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian, sementara sektor-sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Kabupaten Parigi Moutong, di sisi lain, mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan cukup tinggi, khususnya pada tahun 2023 yang mencapai 5,5%. Sementara itu, Kota Palu sebagai ibu kota provinsi mengalami pertumbuhan yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Kabupaten lainnya, seperti Donggala, Buol, dan Toli-Toli, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat, namun tetap berada pada jalur positif.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarwilayah ini umumnya dipengaruhi oleh variasi potensi dan struktur ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan jasa. Kabupaten Morowali menonjol sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir, dengan capaian 6,5% pada tahun 2023, didorong oleh pesatnya perkembangan sektor industri dan pertambangan. Hal ini menjadikan Morowali sebagai salah

satu motor utama pertumbuhan ekonomi provinsi. Kabupaten Parigi Moutong juga menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat secara konsisten, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertanian dan perikanan yang menjadi andalan wilayah tersebut.

Adapun kabupaten seperti Donggala, Sigi, dan Poso mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih moderat, yakni berkisar antara 3,5% hingga 4,7%. Kabupaten Toli-Toli dan Buol, meskipun mencatatkan laju pertumbuhan yang lebih lambat, tetap menunjukkan kinerja positif setiap tahunnya. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan beberapa wilayah seperti Morowali dan Parigi Moutong berperan sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Satu di antara fungsi utama dari anggaran pemerintah daerah adalah sebagai instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam menstabilkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat pemerintah pusat, pelaksanaan kegiatan pemerintahan tercermin dalam APBN, sedangkan di tingkat pemerintah daerah, hal tersebut tercermin dalam APBD. Anggaran daerah ini meliputi bagian pengeluaran (belanja) yang terbagi menjadi pengeluaran rutin, seperti belanja untuk aparatur daerah, dan pengeluaran pembangunan, yang mencakup belanja untuk pelayanan publik.

Pengeluaran pemerintah umumnya mencerminkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penyusunan anggaran. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam perekonomian, pengeluaran ini mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan dinamika kegiatan sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah harus mampu mengelola alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan secara efektif untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Di Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah yang paling besar besar pengeluarannya adalah Kabupaten Banggai dengan rata-rata pengeluaran Rp2.113.683.721,25/tahun. Sementara itu, wilayah yang paling rendah pengeluarannya adalah Kabupaten Banggai Laut dengan rata-rata pengeluaran Rp.617.028.403,25/tahun.

Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2025 (Rupiah).

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Banggai	809.516.707	774.884.900	798.985.458	849.032.765
Kepulauan				
Banggai	1.823.685.331	2.009.070.706	2.317.589.895	2.304.388.953
Morowali	1.234.260.311	1.391.029.815	1.475.300.370	2.021.816.876
Poso	1.366.058.804	1.313.827.450	1.263.514.918	1.347.028.042
Donggala	1.713.873.952	1.262.577.852	1.220.716.353	1.300.987.793
Toli-Toli	1.095.466.697	1.118.273.989	1.120.311.936	1.123.200.462
Buol	1.003.610.322	897.849.834	848.553.304	922.479.202
Parigi Moutong	1.690.147.516	1.524.536.820	1.605.525.434	1.823.512.126
Tojo Una-Una	1.089.364.190	1.033.253.603	1.065.651.010	1.210.992.536
Sigi	1.500.624.994	1.283.553.436	1.198.526.906	1.307.795.789
Banggai Laut	650.021.114	533.233.081	598.728.418	686.131.000
Morowali Utara	1.023.372.761	1.011.529.455	1.135.531.843	1.306.264.508
Palu	1.733.031.450	1.338.835.752	1.733.031.450	1.613.498.345
Jumlah	16.733.034.149	15.492.456.693	16.381.967.295	17.817.128.397
Rata-Rata	1.287.156.473	1.191.727.438	1.260.151.330	1.370.548.338

Sumber : BPS Sulawesi Tengah (2024).

Tabel 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota dalam empat tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan Pengeluaran ini disebabkan oleh meningkatnya komponen belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dianalisis melalui analisis regresi linear sederhana yang diolah melalui perangkat SPSS versi 17. Berdasarkan hasil olah data, disajikan hasil sebagai berikut.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari koefisien regresi dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan atau tidak dalam memengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan tiga jenis uji hipotesis yaitu di antaranya Uji t (uji parsial) dan uji koefisien determinasi (R^2).

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh atau signifikansi secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dengan membandingkan nilai probabilitas dengan signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika probabilitas $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Uji t (Uji Parsial).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.8873	0.34576	43..6508	0.0000
Pengeluaran	1.153	0.04000	70.0947	0.0246

Sumber: Hasil olah data Eviews 12 (2025).

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel pengeluaran memiliki nilai Probabilitas t-stat sebesar 0.0246, lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_1 diterima, H_0 ditolak, artinya variabel pengeluaran memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Tabel di atas menunjukkan persamaan hasil regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.887 + 1.153X + u_{it}$$

Koefisien regresi sebesar 1.153 artinya bahwa ketika nilai pengeluaran naik sebesar 1 rupiah, maka nilai pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 1.153%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi berada dari nol hingga satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sangat baik, begitu sebaliknya jika nilai koefisien determinasi mendekati nol maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen secara baik.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

R-squared	0.999333
Adjusted R-squared	0.999143

Sumber: Hasil olah data Eviews 12 (2025).

Penelitian ini menggunakan satu variabel independen, sehingga yang dilihat dalam uji koefisien determinasi adalah nilai R-Squared. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai dari R-Squared yaitu sebesar 0.999333. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2023 sebesar 99,93 persen dan sisanya yaitu sebesar 0,07 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Hasil analisis regresi secara kuantitatif menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023. Dengan koefisien regresi sebesar 1.153, temuan ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu rupiah dalam pengeluaran pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1.153 persen, dengan tingkat keyakinan statistik yang tinggi ($\text{Prob. } 0.0246 < 0.05$). Kekuatan hubungan ini juga ditegaskan oleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.9993, yang berarti 99,93% variasi pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah. Temuan ini konsisten dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Sumarsono et al. (2022), yang juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan determinan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Dengan demikian, hasil ini bukanlah sebuah anomali, melainkan konfirmasi empiris mengenai peran strategis kebijakan fiskal di tingkat regional.

Salah satu mekanisme utama yang menjelaskan pengaruh signifikan ini adalah alokasi belanja modal pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Investasi pada infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan secara langsung meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang pada gilirannya menurunkan biaya logistik dan memperlancar arus distribusi barang serta jasa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai terbukti memiliki kontribusi krusial dalam meningkatkan produktivitas sektoral, baik di sektor pertanian, industri pengolahan, maupun pertambangan, yang menjadi pilar ekonomi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa infrastruktur yang berkualitas merupakan fondasi untuk menarik investasi swasta dan mengakselerasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Selain belanja modal untuk infrastruktur fisik, pengaruh positif pengeluaran pemerintah juga disalurkan melalui investasi pada modal manusia (human capital). Alokasi anggaran yang signifikan pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kebijakan ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Endogen, yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan, pengetahuan, dan kesehatan merupakan faktor internal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Rehman et al., 2020). Peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan daya saing daerah, yang menjadi prasyarat esensial untuk transformasi ekonomi menuju basis yang lebih maju dan inklusif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang dieksekusi melalui APBD di Sulawesi Tengah telah berfungsi efektif sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pembangunan infrastruktur fisik dan investasi

modal manusia menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat dalam perekonomian daerah. Berbeda dengan analisis pada level mikro seperti kelayakan memproduksi Shuttlecocks yang mengukur profitabilitas dari selisih biaya dan penerimaan (Rohma & Wahyu, 2022), analisis pada level makro ini membuktikan bahwa "investasi" pemerintah dalam bentuk belanja publik menghasilkan "pengembalian" berupa peningkatan output ekonomi (PDRB) yang signifikan. Implikasinya, keberlanjutan momentum pertumbuhan di masa depan akan sangat bergantung pada konsistensi, efektivitas, dan efisiensi alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor produktif tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023. Temuan ini menegaskan bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah provinsi dalam menggunakan instrumen fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor krusial untuk mendorong pembangunan. Alokasi anggaran yang strategis untuk penyediaan barang publik dan pemenuhan layanan dasar terbukti menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja daerah, dengan memprioritaskan belanja modal untuk sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan, seperti infrastruktur strategis dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dengan membedah pengaruh setiap komponen belanja (misalnya, belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara terpisah) agar dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih spesifik dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini. (2024). The influence of fiscal policy on economic growth. *ORGANIZE: Journal of Economics Management and Finance*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.58355/organize.v3i1.74>
- Asti, A. F., & Sinurat, M. (2023). Analysis of the realization of the regional revenue and expenditure budget in increasing the development of coastal areas in the Kulon Progo Regency area. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(10), 2445–2460. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i10.6395>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2024* (I. Mariyano, B. Bahtiar, N. L. L. Devi, & I. G. A. Pelodu, Eds.). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bunyamin, F. (2023). The impact of physical capital and human capital (level of education) on growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(2), 115–130. <https://doi.org/10.14203/jep.30.2.2022.115-130>
- Haciyev, M. (2021). Ekonomik büyüme teorileri. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities*, 8(2), 176–182. <https://doi.org/10.38064/eurssh.210>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak kawasan dan status negara terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara terdampak Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 37–56. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.187>
- Khusaini, M. (2022). Regional competitiveness: Infrastructure, education, and health sectors approach. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(4). <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i4.1997>
- Livingston, V., Jackson-Nevels, B., & Reddy, V. V. (2022). Social, cultural, and economic determinants of well-being. *Encyclopedia*, 2(3), 1183–1199.
- Loli-Poma, T. P., Kausar, T., Iqbal, F., Ramirez-Asis, E., & Asnate-Salazar, E. J. (2021). Nexus between human capital accumulation and economic growth. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(5), 2508–2521. <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.05.128>
- Maneerat, C., & Fazal, S. (2020). The influence of tax revenue, government expenditures, fiscal decentralization, carbon emission, and exports on economic growth of developing countries. *IRASD Journal of Economics*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.52131/joe.2020.0101.0011>
- Meacci, F. (2020). The link between capital accumulation and increasing wages in an updated version of Smith's theory of population. *Journal of the History of Economic Thought*, 42(3), 385–400. <https://doi.org/10.1017/S1053837219000531>
- Mulyadi, D., Puspita, E., Auliarrahma, N. I., Shelvira, S. A., Kintara, I., & Fattah, M. S. F. A. (2024). Regional autonomy in Indonesia: Challenges and opportunities in sustainable development in the era of Sustainable Development Goals (SDGs). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3450>
- Nezhnikova, E. (2020). Investment in human capital as the basis for the country's economic growth. *E3S Web of Conferences*, 164, Article 09046. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016409046>
- Pramasty, D. E., & Rosintan S, L. (2022). Analisis faktor penentu pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN periode tahun 1996–2013. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 1(2), 129–144. <https://doi.org/10.25105/jet.v1i2.13490>
- Rehman, M. A., Ghaffar, S., Shahzadi, K., & Ghazanfar, R. (2020). Human capital formation and economic growth in emerging Asia: Empirical evidence using panel data. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 3(2), 205–212. <https://doi.org/10.47067/ramss.v3i2.54>
- Rohma, F. F., & Wahyu, P. E. A. N. (2022). The analysis of process costing method: A case study in ultra micro business. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(2), 64–75. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.10.02.1-12>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV Alfabeta.

- Sumarsono, H., Qodri, L. A., & Prayitno, P. H. (2022). Government spending, domestic investment, human development index and Indonesian gross domestic product. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 10(2), 150–157. <https://doi.org/10.21009/jpeb.010.2.5>
- Wahyudi. (2020). The relationship between government spending and economic growth revisited. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(6), 84–88. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10614>
- Zhulaikah, S. (2024). Socio-economic influence on inclusive economic development in Eastern Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 8(4), 352–363. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i04.32847>